



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Kabupaten Wajib Menyelenggarakan Data Gender dan Anak dalam rangka menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. Bahwa penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana tersebut pada huruf a adalah salah satu upaya dalam meningkatkan terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) serta Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
 13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
14. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13);
 15. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 39, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 34);
 16. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Gender adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh masyarakat mengenai tugas, peran, tanggung jawab, sikap, dan sifat yang dianggap patut bagi perempuan dan laki-laki yang dapat berubah dari waktu ke waktu.
6. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
7. Data Terpilah adalah nilai variabel-variabel yang terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
8. Data anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki di bawah usia 18 (delapan belas) tahun yang terpilah menurut kategori umur 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.
9. Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta

- data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Perencanaan yang responsif gender adalah proses perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan kegiatan, penerapan analisis gender dengan metode *Gender Analysis Pathway* berdasarkan data terpilah dan statistik gender.
 11. *Gender Analysis Pathway* adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/kegiatan pembangunan.
 12. Pengelolaan Data Gender dan Anak adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak.
 13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
 14. Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan tersebut.
 15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau kehidupan pribadi.
 16. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran, dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
 17. Instansi terkait adalah meliputi instansi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, lembaga masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga non Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaran Data Gender dan Anak dimaksudkan sebagai acuan bagi OPD dan instansi terkait dalam menyediakan dan memanfaatkan data terpilah untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.
- (2) Pedoman Penyelenggaran Data Gender dan Anak bertujuan untuk:
 - a. memperkuat dan mendorong OPD serta instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak secara terpadu sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
 - b. meningkatkan komitmen pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penggunaan data gender dan anak;
 - c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PUHA secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan;

- d. sebagai rujukan bagi OPD dan instansi terkait untuk pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data gender dan anak secara terpadu dan sebagai bahan informasi;
- e. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara data gender dan anak di tingkat kabupaten dan kecamatan.

BAB III JENIS DATA GENDER DAN ANAK Pasal 3

- (1) Jenis data gender dan anak meliputi:
 - a. data terpisah menurut jenis kelamin;
 - b. data terpisah menurut kelompok umur;
 - c. data kelembagaan.
- (2) Data terpisah menurut jenis kelamin meliputi bidang:
 - a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - d. politik dan pengambilan keputusan;
 - e. hukum dan sosial budaya;
 - f. kekerasan.
- (3) Data terpisah menurut kelompok umur meliputi data:
 - a. kelangsungan hidup anak;
 - b. tumbuh kembang anak;
 - c. perlindungan anak.
- (4) Data kelembagaan meliputi data:
 - a. Kelembagaan data pengarusutamaan gender;
 - b. Kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 4

Format jenis data gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN DATA Pasal 5

- (1) OPD dan instansi terkait wajib melakukan pengelolaan data gender dan anak yang meliputi tahapan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. analisis;
 - d. penyajian.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui survey, sensus, registrasi, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh OPD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani, dan lembaga non pemerintah.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data terpisah gender dan anak.
- (4) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menggunakan metodologi pengolahan data sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Untuk mempertajam analisis sosial guna mengetahui dan menerapkan keadilan di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan *Gender Analysis Pathway*.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN DATA
Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan data gender dan anak dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. spesifik;
 - b. dapat dipercaya;
 - c. dapat diukur;
 - d. relevan;
 - e. berkelanjutan.
- (2) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender dan anak.
- (3) Dapat dipercaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- (4) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (6) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan data gender dan anak.
- (2) Dalam penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Untuk mengoordinasikan penyelenggaraan data gender dan anak maka dibentuk Forum Data Terpilah tingkat Kabupaten.
- (4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai ketua Forum Data Terpilah.
- (5) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai sekretaris Forum Data Terpilah.
- (6) Keanggotaan Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembina, Wakil Pembina, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Bidang-bidang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan kepengurusan dan tugas Forum Data Terpilah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Forum Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memiliki tugas:

- a. mengoordinasikan unit-unit pengelola data, unit penelitian, unit perencanaan dan unit pelaporan di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak;
- b. mendorong unit pelaksana/satuan kerja untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah dan analisis gender dan anak di dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan responsif gender dan peduli anak;
- c. mendorong unit pengelola data, unit penelitian, unit pelaporan mendokumentasikan dan mendiseminasikan data terpilah ke dalam publikasi dan system database yang diperbaharui secara rutin;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sisitem data gender dan anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan sistem data gender dan anak kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten.
- (3) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan data gender dan anak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Data terpilah, data anak dan data kelembagaan yang tersedia di setiap OPD dan instansi terkait lainnya akan direkapitulasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- (2) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap akhir tahun berjalan.

BAB VI PENDANAAN Pasal 11

Biaya penyelenggaraan data gender dan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan anggaran dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan data gender dan anak.

- (2) Forum Data Terpilah dapat dijadikan tempat konsultasi bagi OPD yang melaksanakan pengelolaan data gender dan anak.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 13

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan data gender dan anak serta cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan data gender dan anak dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan data gender dan anak kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Data gender dan anak menjadi bagian dari penyusunan buku Profil Gender dan Anak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak
pada tanggal 26 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

JALAN BERUTU

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2022 NOMOR 14



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat non pelayanan dasar. Sub urusan Sistem Data Gender dan Anak merupakan pelembagaan data gender dan anak melalui Peraturan dan mekanisme penyelenggaraan data gender dan anak di Daerah.

Implementasinya dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan harus di dukung oleh semua OPD.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 44

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
Nomor : 14 Tahun 2022
Tanggal : 26 April 2022
Tentang : Pedoman Penyelenggaraan
Data Gender Dan Anak Di
Kabupaten Pakpak Bharat.

DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I. DATA UMUM

Tabel 1.1
JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
		L	%	P	%	L+P
1						
2						
3						
4						
5						
	KABUPATEN					

Sumber data: BPS, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Tabel 1.2
JUMLAH DAN PERSENTASE KEPALA RUMAH TANGGA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN....

No	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA RUMAH TANGGA				
		L	%	P	%	L+P
1						
2						
3						
4						
5						
	KABUPATEN					

Sumber data: BPS

Tabel 1.3
Jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin
tahun.....

No	KECAMATAN	Kelompok Umur											
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun		18-50 Tahun		51 Tahun keatas		TT	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data: BPS, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tabel 1.4.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender(IPG),
dan Indeks Pemberdayaan Gender(IDG) Kabupaten
tahun.....

No	KABUPATEN	IPM	Peringkat	IPG	Peringkat	IDG	Peringkat

Sumber data: BPS

II. BIDANG KESEHATAN

Tabel 2.1
Angka Harapan Hidup(AHH) menurut jenis kelamin
tahun.....

No	KECAMATAN	Angka Harapan Hidup(AHH)		
		L	P	L+P
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: BPS

Tabel 2.2
JUMLAH DAN USIA KEMATIAN IBU HAMIL,
MELAHIRKAN,DAN NIFASMENURUT KELOMPOK USIA
TAHUN.....

No	KECAMATAN	USIA KEMATIAN IBU			Jumlah Kematian Ibu
		< 20	20-34	>=35	
1					
2					
3					
4					
5					
	KABUPATEN				

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.3
PERSENTASE PENYEBAB KEMATIAN IBU PADA MASA HAMIL,
MELAHIRKAN DAN NIFAS
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN IBU	SEBAB KEMATIAN IBU				
			PRDRH	HIPERTENSI DLM KEHAMILAN	INFEKSI	GGN SISTEM PEREDARAN DARAH (JANTUNG, STROKE, DLL)	LAIN-LAIN %
1							
2							
3							
4							
5	KABUPATEN						

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.4
JUMLAH DAN PERSENTASE KELAHIRAN BERDASARKAN
PENOLONG PERSALINAN TAHUN.....

No	KECAMATAN	JUMLAH KELAHIRAN	PENOLONG PERSALINAN			
			TENAGA KESEHATAN	%	LAINNYA	%
1						
2						
3						
4						
5						
	KABUPATEN					

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.5
JUMLAH DAN PERSENTASE CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL(K1/K4) KE SARANA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN.....

No	KECAMATAN	JLH IBU HAMIL	K1		K4	
			JLH	%	JLH	%
1						
2						
3						
4						
5						
	KABUPATEN					

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.6.
JUMLAH DAN PERSENTASE IMUNISASI TETANUS TOXOID(TT) PADA IBU HAMIL TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JLH IBU HAMIL	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL											
			TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5		TT2+	
			JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%
1														
2														
3														
4														
5														
	KABUPATEN													

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.7.
JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN TABLET ZAT BESI(Fe) TAHUN.....

No	KECAMATAN	JLH IBU HAMIL	Mendapat Fe1		Mendapat Fe3	
			JLH	%	JLH	%
1						
2						
3						
4						
5						
	KABUPATEN					

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.8
JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL YANG BERESIKO
TAHUN.....

No	KECAMATAN	JUMLAH BUMIL	BUMIL KEK	% BUMIL KEK	BUMIL KOMPLIKASI KEBIDANAN	% BUMIL KOMP. KEBIDANAN
1						
2						
3						
4						
5						
	KABUPATEN					

Sumber data: Dinas Kesehatan

Tabel 2.9.
JUMLAH PENDERITA HIV/AIDS MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	PENDERITA HIV			PENDERITA AIDS		
		P	L	P+L	P	L	P+L
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber data: Dinas Kesehatan

2.1. USIA PERKAWINAN

Tabel 2.1.1
JUMLAH PERNIKAHAN MENURUT USIA PERKAWINAN, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	USIA PERKAWINAN											
		<16	<19	17-21	19-21	22-25		26-30		31-35		>36	
		P	L	P	L	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data: BPS, Kemenag

Tabel 2.1.2
PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN USIA 10 TAHUN KEATAS
MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	<16th	17-18th	19-24th	>=25 th
1					
2					
3					
4					
5					
	KABUPATEN				

Sumber data: BPS, Kemenag

Tabel 2.1.3
JUMLAH PESERTA / AKSEPTOR KELUARGA BERENCANA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Peserta KB Perempuan						Peserta KB Laki-Laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jumlah	MOP	Kondom	Jumlah	
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber data : Dinas PMDPPA Dan KB

Tabel 2.1.4
UNMET NEED, JUMLAH PUS DAN JUMLAH WUS
TAHUN.....

No	KECAMATAN	UNMET NEED	JUMLAH PUS	JUMLAH WUS
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : Dinas PMDPPA Dan KB

Tabel 2.1.5
PENGGUNA NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA(NAPZA)
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Pengguna NAPZA		
		L	P	L+P
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : Dinas Sosial, Kepolisian

III. BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 3.1
ANGKA PARTISIPASI KASAR(APK)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan

Tabel 3.2
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH(APS)
MENURUT KELOMPOK USIA SEKOLAH, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	7-12			13-15			16-18		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan

Tabel 3.3
ANGKA PARTISIPASI MURNI(APM)
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan

Tabel 3.4.
ANGKA MELEK HURUF(AMH)
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Usia>10			Usia>15			Usia15-24		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan

Tabel 3.5
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH MENURUT
JENIS KELAMIN, JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD/Sederajat			SLTP/Sederajat			SLTA/Sederajat		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama

Tabel 3.6.
PERSENTASE PENDUDUK MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI
YANG DITAMATKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD			SLTP			SLTA			Akademi/PT		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.7.
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN) MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan (P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: BPS, Dinas Pendidikan

Tabel 3.8
JUMLAH GURU NEGERI/SWASTA MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Guru SD/ Sederajat			Guru SLTP/ Sederajat			Guru SLTA/ Sederajat			L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama

Tabel 3.9
JUMLAH GURU NEGERI/SWASTA YANG TELAH
MEMPEROLEH SERTIFIKASI
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Guru SD/ Sederajat			Guru SLTP/ Sederajat			Guru SLTA/ Sederajat			L+P
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama

Tabel 3.10.
JUMLAH PESERTA KEJAR PAKET A, B, DAN C SERTA KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF)MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

N o	KECAMATAN	Paket A			Paket B			Paket C			KF		
		L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P	L	P	L+ P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data: Dinas Pendidikan

Tabel 3.11.
JUMLAH KELULUSAN PAKET A, B, DAN C MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: Dinas Pendidikan

TABEL 3.12.
JUMLAH PENERIMA BEASISWA TINGKAT SD, SLTP DAN SLTA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD/ Sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama

3.2.JUMLAH SISWA BERPRESTASI

Tabel 3.2.1
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DIBIDANG AKADEMIK
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD/ Sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama

Tabel 3.2.2
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DIBIDANG SENI
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD/ Sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 3.2.3
JUMLAH SISWA BERPRESTASI DIBIDANG OLAHRAGA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	SD/ Sederajat			SLTP/ Sederajat			SLTA/ Sederajat		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data: Dinas Pendidikan, Kementerian Agama

IV. BIDANG SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN LINGKUNGAN

Tabel 4.1.
GERAKAN MASYARAKAT PEDULI
LINGKUNGAN DI KABUPATEN TAHUN.....

No	Nama Aliansi/Wadah Perempuan Peduli Lingkungan	Handphone/ Telepon/ E-mail	Ketua	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber Data: Dinas Perkim dan LH

Tabel 4.2
DAMPAK BENCANA LINGKUNGAN TERHADAP GENDER DAN ANAK
TAHUN.....

No	Jenis Bencana	Korban Bencana Lingkungan				Keterangan
		Dewasa		Anak-anak		
		L	P	L	P	
1	Tsunami					
2	Gempa Bumi					
3	Banjir Bandang					
4	Longsor					
5	Angin Puting Beliung					
6	Letusan Gunung					
7	Pencemaran Udara					

Sumber Data: BPBD, Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup

V. BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

Tabel 5.1
TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA(TPAK) BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN,JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA									
		SD		SLTA		SLTA		SARJANA/ DIPLOMA		TOTAL	
		L	p	L	p	L	p	L	p	L	p
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber data: Dinas Sosial

Tabel 5.2.
JUMLAH PENDUDUK MISKIN
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: BPS, Dinas Sosial

Tabel 5.3
TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD)
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN

No	KECAMATAN	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: BPS, Dinas Sosial

Tabel 5.4
 TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)
 MENURUT JENIS KELAMIN
 TAHUN.....

No	KECAMATAN	Tenaga kerja migran Antar Kerja Antar Negara(AKAN)		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: BPS, Dinas Sosial

Tabel. 5.5
 PEKERJA DI SEKTOR FORMAL MENURUT JENIS KELAMIN
 TAHUN.....

No	KECAMATAN	Pekerjadi Sector formal		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: BPS,Dinas Sosial

Tabel 5.6
 PEKERJA DI SEKTOR INFORMAL MENURUT JENIS KELAMIN
 TAHUN.....

No	KECAMATAN	Pekerja di Sector informal		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : BPS,Dinas Sosial

Tabel 5.7
JUMLAH PEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jumlah Pekerja			Lembaga Pemerintahan		
		L	P	L+P	L	P	%
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber data : BPSDM

Tabel 5.8
JUMLAH PEKERJA DI LEMBAGA NON PEMERINTAHAN MENURUT JENIS
KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jumlah Pekerja			Lembaga Non Pemerintahan		
		L	P	L+P	L	P	%
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber data : BPS, Dinas Sosial

Tabel 5.9
JUMLAH USAHA MIKRO DAN KECIL(UMK)
MENURUT JENIS KELAMIN PEMILIK USAHA
TAHUN.....

NO	KECAMATAN	PEMILIK USAHA		JUMLAH
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber Data: Dinas Koperasi dan UMKM

Tabel 5.10
JUMLAH PENGURUS USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Pengurus UKM		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: Dinas Koperasi dan UMKM

Tabel 5.11
KEANGGOTAAN KOPERASI MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Keanggotaan Koperasi		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: Dinas Koperasi dan UKM

TABEL 5.12
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Pengangguran Terbuka		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : BPS, Dinas Sosial

TABEL 5.13
JUMLAH PEKERJA TIDAK DIBAYAR
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Pekerja Tidak diBayar		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : Dinas Sosial
 Catatan: Pekerja tdk dibayar merupakan pekerja keluarga

Tabel 5.14
JUMLAH DAN PERSENTASE PEREMPUAN PEKERJA PROFESIONAL
DAN MANAJERIAL TAHUN.....

No	KECAMATAN	Perempuan Pekerja Profesional dan Manajerial	
		Jumlah	Persentase
1			
2			
3			
4			
5			
	KABUPATEN		

Sumber data : Dinas Sosial

5.1 Pekerja Menurut Lapangan Usaha, Status Pekerjaan, dan Jenis Pekerjaan

Tabel 5.1.1.
JUMLAH PEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA,
JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin	Lapangan Usaha					
			1	2	3	4	5	6
1		L						
		P						
		L+P						
2		L						
		P						
		L+P						
3		L						
		P						
		L+P						
4		L						
		P						
		L+P						
5		L						
		P						
		L+P						
	Jumlah	L						
		P						
		L+P						

Sumber Data : BPS, Dinas Sosial
Keterangan:
1 =Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan
2 =Industri Pengolahan
3 =Perdagangan Besar, Eceran, Rumah makan dan Hotel
4 =Jasa Kemasyarakatan
5 =Jasa Konstruksi
6= Lainnya

Tabel 5.1.2.
JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN,
JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin	Status Pekerjaan						
			1	2	3	4	5	6	7
1		L							
		P							
		L+P							
2		L							
		P							
		L+P							
3		L							
		P							
		L+P							
4		L							
		P							
		L+P							
5		L							
		P							
		L+P							
	JUMLAH	L							
		P							
		L+P							

Sumber Data :BPS, Dinas Sosial

- Keterangan:
- Berusaha Sendiri
 - Berusaha Dibantu(buruh tidak tetap)
 - Berusaha dibantu(Buruh tetap)
 - Buruh/karyawan
 - Pekerja bebas dipertanian
 - Pekerja bebas non pertanian
 - Pekerja tak dibayar

Tabel 5.1.3.
JUMLAH PENDUDUK BEKERJA MENURUT JENIS PEKERJAAN,
JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin	Jenis Pekerjaan					Jumlah
			1	2	3	4	5	
1		L						
		P						
		L+P						
2		L						
		P						
		L+P						
3		L						
		P						
		L+P						
4		L						
		P						
		L+P						
5		L						
		P						
		L+P						
	JUMLAH	L						
		P						
		L+P						

Sumber Data : BPS, Dinas Sosial

- 1 =Tenaga Profesional, Teknisi danTenaga lain yang bersangkutan dengan itu
- 2 =Tenaga Kepemimpinan&ketatalaksanaan dan Pejabat Pelaksana, tenaga TU dan Tenaga yang bersangkutan dengan itu
- 3 =Tenaga Usaha Penjualan
- 4 =Tenaga Usaha Jasa & TU Tani, Kebun, Ternak, Ikan dan Hutan
- 5 =Tenaga Produksi, operasional angkutan & Pekerja Kasar Lainnya

VI. BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

6. Perempuan di Lembaga Eksekutif

Tabel 6.1
JUMLAH CAMAT DI KABUPATEN
TAHUN.....

No	JUMLAH CAMAT	Jenis Kelamin		L+P
		Laki-laki(L)	Perempuan(P)	

Sumber data: DINAS PMDPPA DAN KB

Tabel 6.2
JUMLAH KEPALA DESA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data: DINAS PMDPPA DAN KB

Tabel 6.3
JUMLAH PEJABAT MENURUT JENIS JABATAN, JENIS KELAMIN
TAHUN....

No	OPD	Eselon I		Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Eselon V		Fungsional umum		Fungsional tertentu	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1															
2															
3															
4															
5															
6															
	TOTAL														

Sumber Data: BPSDM

Tabel 6.4
JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN, JENIS KELAMIN
TAHUN....

NO	OPD	GOLONGAN I		GOLONGAN II		GOLONGAN III		GOLONGAN	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1									
2									
3									
4									
5									
6									
	TOTAL								

Sumber Data: BPSDM

Tabel 6.1.5
TIMBA DAN PERTIMBANGAN DAN KEPANGKATAN
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN....

No	OPD	Laki-laki(L)	Perempuan(P)	L+P
1				
2				
3				
4				
5				
	TOTAL			

Sumber data BPSDM

6.2. Perempuan di Lembaga Legislatif:

Tabel 6.2.1
JUMLAH ANGGOTA DPRD MENURUT JENIS KELAMIN, TAHUN..

NO	JUMLAH ANGGOTA DPRD KABUPATEN	L	P	JUMLAH	%

Sumber data : Sekretariat DPRD

Tabel 6.2.2
JUMLAH CALON LEGISLATIF DAN PENGURUS HARIAN PARTAI POLITIK MENURUT
JENIS KELAMIN TAHUN

No	NAMA PARPOL	Caleg			Pengurus Harian Parpol		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1							
2							
3							
4							
5							
	Jumlah						

Sumber data: Badan Kesbangpol

TABEL 6.2.3.
JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA KAUKUS PEREMPUAN POLITIK
TAHUN...

No	KECAMATAN	Kaukus Perempuan Politik	
		Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota
1			
2			
3			
4			
5			
	Jumlah		

Sumber data : Kesbangpol

Tabel 6.2.4
JUMLAH ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN....

No	KECAMATAN	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Anggota BPD		L+P
			L	P	
1					
2					
3					
4					
5					
	KABUPATEN				

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB

Tabel 6.2.5
JUMLAH CALON KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA
DAERAH MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN....

No	PAKPAK BHARAT	Calon Kepala Daerah			Calon Wakil Kepala Daerah		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1							

Sumber data: KPU, Kesbangpol

6.3 Perempuan di Lembaga Yudikatif

Tabel. 6.3.1
JUMLAH POLISI MENURUT JENIS KEPANGKATAN DAN JENIS
KELAMIN TAHUN.....

N O	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		Jumlah
		L	P	
1				
2				
3				

Sumber Data: Kepolisian

Tabel 6.3.2
JUMLAH PEJABAT KEPOLISIAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN WILAYAH
TAHUN....

No	WILAYAH	PEJABAT DIKEPOLISIAN		
		KAPOLSEK		
		L	P	L+P
1				
2				
3				

Sumber data: Kepolisian

Tabel 6.3.3
JUMLAH PEJABAT KEPOLISIAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN WILAYAH
TAHUN....

No	WILAYAH	PEJABAT DIKEPOLISIAN		
		KAPOLSEK		
		L	P	L+P
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Sumber data: Kepolisian

VII. BIDANG HUKUM DAN SOSIAL-BUDAYA

7.1 Jumlah Penghuni Rumah Tahanan

Tabel. 7.1
JUMLAH PENGHUNI RUMAH TAHANAN(RUTAN) MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	RUTAN	Jumlah penghuni Rutan		L+P
		L	P	
1				
2				
3				
4				

Sumber Data: Kepolisian

7.2 Penduduk Lanjut Usia(Lansia)

Tabel 7.2.1.
PENDUDUK LANSIA MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN,
JENIS KELAMIN TAHUN...

No	KECAMATAN	Tidak /Belum Sekolah		Belum Tama t SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Pergu ruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data: BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 7.2.2
JUMLAH PENDUDUK LANSIA MENURUT AKTIVITAS YANG DILAKUKAN,
JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Aktivitas yang dilakukan									
		Pertanian		Indus tri/Peng olahan		Perdaga ngan		Jasa/ Sosial		Lain-lain	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber data: BPS, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

7.4. Penyandang Disabilitas (Penda)

Tabel 7.4.1
JUMLAH PENDA MENURUT JENIS KELAMIN,TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Tidak /Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Perguruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data: Dinas Pendidikan , Dinas Sosial

TABEL 7.4.2
PENDA MENURUT AKTIVITAS YANG DILAKUKAN, JENIS
KELAMIN TAHUN

No	KECAMATAN	Aktivitas yang dilakukan									
		Pertani an		Industri /Pengol ahan		Perdaga ngan		Jasa/Sosi al		Lain-lain	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber data:BPS, Dinas Sosial

Tabel 7.5
JUMLAH PENGUNGSI AKIBAT KONFLIK/BENCANA
MENURUT USIA, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	KECAMATAN	PENGUNGSI KONFLIK/BENCANA					
		Usia0-17Tahun			Usia>18Tahun		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1							
2							
3							
4							
5							
6	KABUPATEN						

Sumber data: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 7.6
JUMLAH KASUS PERCERAIAN YANG DIPUTUS DIPENGADILAN AGAMA
MENURUT SUMBER PERMOHONAN TAHUN.....

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KASUS	SUMBER PERMOHONAN	
			PERMOHONAN SUAMI	GUGATAN ISTRI
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6	KABUPATEN			

Sumber data: Kemenag, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VIII. KEKERASAN
8.1. Kekerasan Terhadap Perempuan

TABEL 8.1.1
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN MENURUT KELOMPOK UMUR
TAHUN...

No	KECAMATAN	Kelompok Umur			Total
		Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun keatas	
1					
2					
3					
4					
5					
	KABUPATEN				

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, Kepolisian

TABEL 8.1.2.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN...

No	KECAMATAN	Tingkat Pendidikan					
		Tidak/Blm Sekolah	Belum Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Perguruan Tinggi
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.3.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN MENURUT STATUS PEKERJAAN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Status						
		Berusaha sendiri	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Berusaha dibantu buruh tetap	Buruh/Karyawan/Pegawai	Pekerja bebas di pertanian	Pekerja bebas di non pertanian	Pekerja keluarga
1								
2								
3								
4								
5								
	KABUPATEN							

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

Tabel 8.1.4
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PERKAWINAN TAHUN...

No	KECAMATAN	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.5.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS KEKERASAN TAHUN...

No	KECAMATAN	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1							
2							
3							
4							
	KABUPATEN						

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.6
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TEMPAT KEJADIAN TAHUN...

No	KECAMATAN	Tempat Kejadian			
		Rumah Tangga	Tempat Kerja	Fasilitas Umum	Lainnya
1					
2					
3					
4					
	KABUPATEN				

Sumber data: Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.7
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN TAHUN...

No	KECAMATAN	Jenis layanan yang diberikan				
		Penanganan Pengaduan	Pelayanan Kesehatan	Rehabilitasi Sosial	Penegakan dan Bantuan Hukum	Pemulangan&Reintegrasi
1						
2						
3						
4						
	KABUPATEN					

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.8
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT FREKUENSI KEKERASAN TAHUN...

No	KECAMATAN	Frekuensi Kekerasan		
		Baru	Berulang	Rujukan
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber data : Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.9
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Kelompok Umur			Total
		L	P	Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber data: PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.10
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	KECAMATAN	Tidak/Belum Sekolah		Belum Tamat SD		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		Perguruan Tinggi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KAB												

Sumber data: Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.11
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT STATUS PEKERJAAN, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	KECAMATAN	Bekerja		Tidak/Belum Bekerja		Total		
		L	P	L	P	L	P	L+P
1								
2								
3								
4								
5								
	KABUPATEN							

Sumber data: Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.12
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
MENURUT HUBUNGAN DENGAN KORBAN, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	KECAMATAN	Hubungan dengan Korban							
		Orang Tua		Keluarga		Suami	Istri	Lainnya	
		L	P	L	P			L	P
1									
2									
3									
4									
5									
	KABUPATEN								

Sumber data: Dinas PMDPPA DAN KB, PESADA, KEPOLISIAN

TABEL 8.1.13
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENURUT
KEBANGSAAN, JENIS KELAMIN
TAHUN...

No.	Kabupaten/Kota	Kebangsaan			
		Indonesia		Asing	
		L	P	L	P
1					
2					
3					
4					
5					
	Kabupaten				

Sumber data: KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

8.2. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING)

TABEL 8.2.1
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN
TAHUN...

NO.	Kecamatan	KELOMPOK UMUR				TOTAL	
		0-18 Thn (Anak)		>18 Thn (Dewasa)			
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
5							
	Kabupaten						

Sumber data: KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 8.2.2
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT
PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN...

NO	KAB/KOTA	TINGKAT PENDIDIKAN									
		Tidak Sekolah		SD/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SMA/ Sederajat		PT	
		L	L	P	L	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
5											
	KAB										

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 8.2.3.
JUMLAH KORBAN PERDAGANGAN ORANG MENURUT STATUS
PERKAWINAN, JENIS KELAMIN TAHUN...

NO	Kecamatan	STATUS PERKAWINAN					
		Belum Kawin		Kawin		Cerai	
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
5							
	Kabupaten						

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 8.2.4.
 JUMLAH KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
 ORANG
 MENURUT JENIS LAYANAN TAHUN...

No	Kecamatan	Pendataan/ Identifikasi	Layanan Psikososial	Rehabilitasi Medis	Rehabitasi Sosial	Bantuan Hukum	Pemulangan	Reintegrasi Sosial
1								
2								
3								
4								
5								
	Kabupaten							

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 8.2.5
 JUMLAH PELAKU KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT
 TINGKATAN PROSES HUKUM,JENIS KELAMIN
 TAHUN...

NO	Kecamatan	TINGKATAN PROSES HUKUM						KETERANGAN
		Penyidikan		Penuntutan		Putusan Pengadilan		
		L	P	L	P	L	P	
1								
2								
3								
4								
5								
	Kabupaten							

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 8.2.6
AMAR PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN.....

NO	Kecamatan	AMAR PUTUSAN						KETERANGAN
		Pidana (Thn)		Denda (Rp.)		Restitusi (Rp.)		
1								
2								
3								
4								
5								
	Kabupaten							

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 8.2.7
GUGUS TUGAS DAN KEBIJAKAN TERKAIT PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN.....

N o.	Kecamatan	GugusTugas		Rencana Aksi Daerah PP-TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/SE)
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								
	Kabupaten							

Sumber data : Dinas PMDPPA Dan KB

IX. DATA ANAK
9.1. Kekerasan Terhadap Anak

TABEL 9.1.1
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN, JENIS KELAMIN
TAHUN...

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan									
		Fisik		Psikis		Seksual		Sosial		Penelantaran	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1											
2											
3											
4											
5											
	Kabupaten										

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

Tabel 9.1.2.
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	Kecamatan	Kelompok Umur						Total		
		0-5 Tahun		6-12 Tahun		13-17 Tahun				
		L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1										
2										
3										
4										
5										
	Kabupaten									

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL
9.1.3
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT TEMPAT KEJADIAN, JENIS
KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN.....

No	Kecamatan	Tempat Kejadian							
		Rumah		Lingkungan Masy.		Sekolah		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1									
2									
3									
4									
5									
	Kabupaten								

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 9.1.4
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT JENIS LAYANAN YANG DIBERIKAN, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	Kecamatan	Jenis Layanan Yang Diberikan													
		Penanganan Pengaduan		Pelayanan Kesehatan		Rehabilitasi Sosial		Penegakan dan Bantuan Hukum		Pemulangan & Reintegrasi		Perlindungan dan rasa Aman		Mediasi	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1															
2															
3															
4															
5															
	Kabupaten														

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 9.1.5
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN TAHUN...

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Kelompok Umur			Total
		L	P	Anak (0<18 Tahun)	Remaja (18-<25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1							
2							
3							
4							
5							
	Kabupaten						

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 9.1.6
JUMLAH PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK
MENURUT HUBUNGAN PELAKU, JENIS KELAMIN TAHUN....

No	Kecamatan	Hubungan Pelaku Dengan Korban											
		Orang Tua		Keluarga		Tetangga		Petugas di sekolah (Guru dll)		Teman dekat		Lainnya	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	Kabupaten												

Sumber data : KEPOLISIAN, Dinas PMDPPA Dan KB, Pesada

TABEL 9.2
JUMLAH ANAK JALANAN
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Total
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumber Data : Dinas Sosial

TABEL 9.3.
JUMLAH PEKERJA ANAK(BERUMUR 10-17 TAHUN)
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Total
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumber data: Dinas Sosial, BPS

TABEL 9.4
JUMLAH PEKERJA RUMAH TANGGA ANAK
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumber data: Dinas Sosial, BPS

TABEL 9.5
JUMLAH ANAK TERLANTAR
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber Data: Dinas sosial

TABEL 9.6
JUMLAH PEKERJA ANAK DISEKTOR BERBAHAYA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber Data : Dinas Sosial

TABEL 9.7
PERSENTASE ANAK YANG BERUMUR DIBAWAH 18 TAHUN
MENURUT KEPEMILIKAN AKTA LAHIR, JENIS KELAMIN DAN TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jumlah Anak Usia <18 Tahun	Memiliki Akta Lahir			Tidak Memiliki Akta Lahir		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1								
2								
3								
4								
5								
	KABUPATEN							

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TABEL 9.8
JUMLAH ANAK YANG MEMANFAATKAN TELEPON SAHABAT ANAK
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN.....

No	KAB/KOTA	Jumlah Anak Yang Memanfaatkan TESA		Total (L+P)
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	PROVSU			

Sumber Data: Dinas Komunikasi dan Informatik,

9.10. ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.

TABEL 9.10.1.
JUMLAH TENAGA TERAPHIS ABK
MENURUT JENIS PELAYANAN KESEHATAN, JENIS KELAMIN TAHUN..

No	KECAMATAN	Jenis pelayanan kesehatan					
		Puskesmas		Rumah Sakit		Klinik	
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber Data: Dinas Kesehatan

TABEL 9.10.2.
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG MELAYANI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
(ABK) MENURUT JENIS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN..

No	KECAMATAN	Jenis Pelayanan Kesehatan		
		Puskesmas	Rumah Sakit	Klinik
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber Data: Dinas Kesehatan

TABEL 9.10.3.
JUMLAH TENAGA MEDIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS(ABK) MENURUT
JENIS TENAGA MEDIS, JENIS KELAMIN TAHUN..

No	KECAMATAN	Jenis Tenaga Medis					
		Dokter Anak		Dokter Rehab Medis		Psikolog	
		L	P	L	P	L	P
1							
2							
3							
4							
5							
	KABUPATEN						

Sumber Data: Dinas Kesehatan

TABEL 9.10.4
JUMLAH SLB NEGERI DAN SWASTA
TAHUN..

N O	KECAMATAN	SLB Negeri				Jlh	SLB Swasta				Jlh
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1											
2											
3											
4											
5											
	KABUPATEN										

Sumber Data: Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.5.
JUMLAH GURU NEGERI DAN SWASTA DI SLB
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN, JENIS KELAMIN
TAHUN..

N o	KEC	Guru Negeri di SLB								Jlh	Guru Swasta di SLB								Jlh
		TK		SD		SMP		SMA			TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L	P	L	P			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
	KAB																		

Sumber Data : Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.6.
JUMLAH GURU PENDAMPING KHUSUS MENURUT JENJANG PENDIDIKAN,
JENIS KELAMIN TAHUN..

No	KECAMATAN	Sekolah							
		TKLB		SDLB		SMPLB		SMA LB	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1									
2									
3									
4									
5									
	KABUPATEN								

Sumber Data : Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.7.
JUMLAH SEKOLAH INKLUSIF (ABK,ANAK ANAK CERDAS DAN BERBAKAT),
JUMLAH RUANG KELAS DAN JUMLAH SISWA MENURUT
JENJANG PENDIDIKAN
TAHUN..

No	KECAMATAN	Sekolah Inklusif											
		Jenjang Pendidikan			Ruang Kelas			Jumlah Siswa					
		SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA	SD		SMP		SMA	
								L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data : Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.8.
JUMLAH SEKOLAH AKSELERASI (ABK,ANAK ANAK CERDAS DAN BERBAKAT),
JUMLAH RUANG KELAS DAN JUMLAH SISWA
MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN..

N o	KECAMATAN	Sekolah Akselerasi											
		Tingkat				Ruang Kelas				Jumlah Siswa			
		SMP		SMA		SMP		SMA		SMP		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1													
2													
3													
4													
5													
	KABUPATEN												

Sumber data : Dinas Pendidikan

TABEL 9.10.9.
JUMLAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) MENURUT
JENIS ABK, JENIS KELAMIN
TAHUN..

NO	Kab/kota	JENIS ABK (Anak Berkebutuhan Khusus)																								Total
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
	KAB																									

SumberData : BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial

Keterangan Jenis ABK:

1. Tuna Netra
2. Tuna Rungu
3. Tuna Grahita
4. Tuna Daksa
5. Tuna Laras
6. Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan/atau bakat istimewa
7. Tuna Ganda
8. Autis
9. Gangguan pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/ GPPH (Attentionand Hyperactivity Disorder/ ADHD)
10. Lamban Belajar
11. Kesulitan Belajar
12. Gangguan Komunikasi

TABEL 9.10.10.
JUMLAH FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ABK MENURUT
BENTUK TAHUN..

No	KECAMATAN	Bentuk			Jumlah
		Forum Komunikasi Keluarga ABK (anak dengan kecacatan)	YPAC	Aliansi RBM	
1					
2					
3					
4					
5					
	KABUPATEN				

Sumber Data : Dinas Sosial

9.11.Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) TABEL

9.11.1.
JUMLAH ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MENURUT
JENIS KELAMIN
TAHUN..

No	KECAMATAN	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1				
2				
3				
4				
5				
	KABUPATEN			

Sumber Data: Kepolisian, PESADA, Dinas PMDPPA DAN KB, Dinas Sosial

TABEL 9.11.2.
JUMLAH KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
MENURUT JENIS KASUS, JENIS KELAMIN
TAHUN.....

N o	KECAMA TAN	Pencu rian		Asusi la		Pembunu han		Narko ba		Pengania yaan		Lainnya		Total
1	2	3		4		5		6		7		8		(9)=3+4 +5+6+7 +8
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
1														
2														
3														
4														
5														
	Jumlah													

Sumber Data : Kepolisian, PESADA, Dinas PMDPPA DAN KB

9.12. DATA TUMBUH KEMBANG ANAK

TABEL 9.12.1.
JUMLAH LEMBAGA DAN PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN.....

No	KECAMATAN	Jmh Anak Usia 0-6 Tahun	PAUD NON FORMAL		PAUD FORMAL		Jumlah Anak terlayani (F+NF)	Jlh Blm Terlayani	Persentase terlayani (F+NF)	Persentase terlayani PAUD NF
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah				
			Lemba ga	Peserta Didik	Lemba ga	Peserta Didik				
1										
2										
3										
4										
5										
	KABUPATEN									

Sumber data : Dinas Pendidikan

TABEL 9.12.2.
ANGKA MELEK HURUF DAN BUTA HURUF MENURUT JENIS KELAMIN
TAHUN.....

NO.	KECAMATAN	ANGKA MELEK HURUF			Angka Buta Huruf		
					Usia 15-24 Tahun		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	KABUPATEN						

Sumber data : BPS & Dinas Pendidikan

TABEL 9.12.3.
JUMLAH SISWA PUTUS SEKOLAH
MENURUT JENJANG PENDIDIKAN,JENIS KELAMIN
TAHUN.....

No	KECAMATAN	JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS		JUMLAH SISWA		JUMLAH PUTUS	
		SD/ MI		SEKOLAH SD		SMP/ MTs		SEKOLAH SMP		SMA/ SMK/ MA		SEKOLAH SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
	KABUPATEN												

Sumber data : Dinas Pendidikan

9.13.DATA KELANGSUNGAN HIDUP

TABEL 9.13.1.
JUMLAH KEMATIAN BAYI DAN BALITA
TAHUN.....

NO	Kecamatan	BAYI			BALITA		
		JLH BAYI MATI			JLH BALITA MATI		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1							
2							
3							
4							
5							
	Kabupaten						

Sumber data : Dinas Kesehatan
Ket : Balita =0-5 tahun, Bayi = 0-1 tahun

TABEL 9.13.2.
JUMLAH BALITA MENDAPATKAN IMUNISASI
TAHUN.....

NO	Kecamatan	JLH LAHIR HIDUP			BAYI DIIMUNISASI																																			
					Hb < 7 hari						BCG						DPT-HB3/DPT-HB-Hib3						POLIO 4 ^a						CAMPAK						IMUNISASI DASAR LENGKAP					
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
	Kabupaten																																							

Sumber data : Dinas Kesehatan

TABEL 9.13.3.
JUMLAH BAYI DENGAN BERAT BADAN RENDAH
TAHUN.....

NO.	Kecamatan	JUMLAH BAYI LAHIR		BAYI DENGAN BB RENDAH	
		L	P	L	P
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6	Kabupaten				

Sumber data : Dinas Kesehatan

TABEL 9.13.4.
JUMLAH BAYI MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF SELAMA 6 BULAN
TAHUN.....

NO.	Kecamatan	JUMLAH BAYI LAHIR		BAYI MENDAPATKAN ASI EKSLUSIF 6 BULAN	
		L	P	L	P
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6	Kabupaten				

Sumber data : Dinas Kesehatan

TABEL 9.13.5.
JUMLAH KASUS BALITA KURANG GIZI DAN GIZI
BURUK TAHUN.....

NO.	Kecamatan	JML KASUS BALITA KURANG GIZI		JML KASUS BALITA GIZI BURUK	
		L	P	L	P
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6	Kabupaten				

Sumber data : Dinas Kesehatan

TABEL 9.13.6.
JUMLAH ANAK TERINFEKSI HIV/AIDS
TAHUN.....

NO.	Kecamatan	ANAK TERINFEKSI HIV		ANAK MENDERITA AIDS	
		L	P	L	P
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6	Kabupaten				

Sumber data : Dinas Kesehatan

TABEL
9.13.7.
JUMLAH ANAK KORBAN NAPZA TAHUN.....

NO.	Kecamatan	ANAK KORBAN NAPZA		
		L	P	L+P
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6	Kabupaten			

Sumber data : Dinas Kesehatan, Kepolisian

9.13.8. Perkawinan Usia Anak

TABEL 9.13.8.1.
JUMLAH PERNIKAHAN
MENURUT USIA, JENIS KELAMIN, TAHUN.....

NO.	Kecamatan	JUMLAH PERNIKAHAN			
		<16 Tahun	<19 Tahun	17-21 Tahun	19-21 Tahun
		P	L	P	L
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6	Kabupaten				

Sumber data : Kantor Kementerian agama

TABEL 9.13.8.2.
PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN USIA 10 TAHUN KEATAS
MENURUT USIA PERKAWINAN PERTAMA
TAHUN.....

NO.	Kecamatan	USIA PERKAWINAN PERTAMA			
		<16 Tahun	17-18 Tahun	19-24 Tahun	25 Tahun ke atas
		P	L	P	L
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6	Kabupaten				

Sumber data : BPS, Kantor kementerian agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X. DATA KELEMBAGAAN
10.1. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
A. Kesehatan:

TABEL 10.1.1
JUMLAH POKJATAP GSI, SATGAS GSI, RUMAH SAKIT SAYANG IBU DAN BAYI DAN KELOMPOK SUAMI SIAP, ANTAR, JAGA (SUAMI SIAGA), DAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) TAHUN

No	Kecamatan	Pokjatap GSI Kab/Kota	Satgas GSI Tk.Kec	Satgas GSI Tk. Desa/ Kel	RSSI-B	Kelompok Suami Siaga	Kader BKB
1							
2							
3							
4							
5							
	Kabupaten						

Sumber data : Dinas Kesehatan, Dinas PMDPPA Dan KB

B. Pendidikan

TABEL 10.1.2.
JUMLAH POKJATAP PENURUNAN BUTA AKSARA PEREMPUAN(PBAP), DAN GUGUS TUGAS PBAP TAHUN

No	Kecamatan	PBAP	Gugus Tugas PBAP	Ket
1				
2				
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumber data : Dinas Pendidikan

- C. Ekonomi:
- DesaPrima; P2WKSS, Organisasi UMKM, Koperasi, Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Organisasi Perempuan Pengusaha, Lembaga Keuangan Mikro, Kelompok Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Koperasi Perempuan, Kelompok Tani / Nelayan Perempuan

TABEL 10.1.3.

JUMLAH DESA “PRIMA” (PEREMPUAN INDONESIA MAJU MANDIRI)

TAHUN.....

No	Kecamatan	Kecamatan	Desa/Kel.	Jumlah
1		1..... 2.....		
2		1..... 2.....		
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumberdata :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TABEL 10.1.4.

PROGRAM P2WKSS, JUMLAH UMKM, KOPERASI, ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, KELOMPOK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PEREMPUAN, BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM), KOPERASI PEREMPUAN, DAN KELOMPOK TANI/NELAYAN PEREMPUAN

TAHUN.....

No.	Kecamatan	P2WKSS	UMKM	KOPERASI	ORGANISASI PEREMPUAN PENGUSAHA	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	KELOMPOKUSAHA MKMPEREMPUAN	KELOMPOKTANI PEREMPUAN	KELOMPOK NELAYAN PEREMPUAN
1									
2									
3									
4									
5									
	Kabupaten								

Sumbe rdata : Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMDPPA Dan KB

D.PUG:
Pokja PUG, Forum Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP), Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP), Forum Perlindungan Perempuan, *Focal Point* Gender

TABEL10.1.5.
JUMLAH POKJA PUG, FORUM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN (PKHP), FORUMPENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP), FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, *FOCAL POINT* GENDER TAHUN.....

No	Kecamatan	Pokja PUG	Forum PKHP	Forum PPEP	Forum Perlindungan Perempuan	<i>FocalPoint</i> Gender
1						
2						
3						
4						
5						
	Kabupa ten					

Sumber data : DINAS PP & PA, Dinas Koperasi dan UMKM

E. Perlindungan Perempuan dan Anak :
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan, dan penanganan korban

TABEL 10.1.6.
DAFTAR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTDPPA) TAHUN.....

No	Nama UPTDPPA	Alamat	Dasar Hukum pembentukan
1			
2			
3			
4			
5			

Sumber data : DINAS PMDPPA & KB

F. Hasil Kajian atau Hasil Penelitian tentang PUG, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan

TABEL 10.1.7.
HASIL KAJIAN ATAU HASIL PENELITIAN TENTANG PUG, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN.....

No	OPD	Hasil Kajian
1		1..... 2.....
2		1..... 2.....
3		
4		
5		

Sumbe rdata : DINAS PMDPPA & KB, Bappelitbangda, Inspektorat, BPKPD

TABEL 10.1.8.
JUMLAH DAN JENIS PERATURAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN.....

No	OPD	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	
3		1..... 2.....	
4		1..... 2.....	
5		1..... 2.....	
6		1..... 2.....	

Sumber data : DINAS PMDPPA & KB, Bagian Hukum

TABEL 10.1.9.
JUMLAH DAN JENIS KEBIJAKAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
TAHUN.....

No	OPD	Jenis Kebijakan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	
3		1..... 2.....	
4		1..... 2.....	
5		1..... 2.....	
6	KAB	1..... 2.....	

Sumber data : DINAS PMDPPA & KB, Bagian Hukum

TABEL 10.1.10.
JUMLAH DAN JENIS PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN.....

No	OPD	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	
3		1..... 2.....	
4		1..... 2.....	
5		1..... 2.....	
6		1..... 2.....	

Sumber data : DINAS PMDPPA & KB, Bagian Hukum

TABEL 10.1.11.
JUMLAH DAN JENIS KEBIJAKAN
DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
TAHUN.....

No	OPD	Jenis Kebijakan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	
3		1..... 2.....	
4		1..... 2.....	
5		1..... 2.....	
6		1..... 2.....	

Sumber data : DINAS PPM DPPA Dan KB,Bagian Hukum

TABEL 10.1.12.
LEMBAGA YANG BERGERAK DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN

No	Kecamatan	RP TC	LB H	PK T	PP T	UPP A	Women Crisis Center	She lter	Rumah Singgah	R P S	Panti Asuh an Anak	L P A	L S M
1													
2													
3													
4													
5													
	Kabupaten												

Sumber data : DINAS PP & PA, DINAS SOSIAL, KESBANGPOL

TABEL 10.1.13.
LEMBAGA/BADAN/UNIT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK TAHUN ...

No.	Nomenklatur kelembagaan	Dasar Hukum/Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan/ Eselonisasi	Alamat Kantor (Telp.Fax, Email)
1				
2				
3				
4				
5				

Sumber data : Dinas PMDPPA Dan KB

TABEL 10.1.14.
DAFTAR KELEMBAGAAN PUSAT STUDI WANITA/GENDER
TAHUN.....

No.	Nama Universitas/ Perguruan Tinggi	Dasar Hukum/ Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan/ Ketua	Alamat Kantor (Telp.Fax, Email)
1				
2				
3				
4				
5				

Sumbe rdata : DINAS PPMDDPPA Dan KB, KESBANGPOL

TABEL 10.1.15.
DAFTAR LEMBAGA MASYARAKAT/ORGANISASI
MASYARAKAT/LBH/KOMUNITAS/RELAWAN YANG PEDULI
PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN.....

No.	Kecamatan	Nama Kelembagaan/ LSM/LBH/ Komunitas/ Relawan	Nama Pimpinan/Ketua	Alamat Kantor (Telp.Fax,Email)
1				
2				
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumber data : KESBANGPOL, DINAS PPMDDPPA Dan KB

10.2. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

TABEL 10.2.1.
JUMLAH DAN JENIS PERATURAN DAERAH YANG PEDULI ANAK
TAHUN.....

No	Kecamatan	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	
3		1..... 2.....	
4		1..... 2.....	
5		1..... 2.....	
6	Kabupaten	1..... 2.....	

Sumber data : DINAS PP & PA

TABEL 10.2.2
JUMLAH DAN JENIS KEBIJAKAN DAERAH YANG PEDULI ANAK
TAHUN.....

No	Kecamatan	Jenis Kebijakan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1		1..... 2.....	
2		1..... 2.....	
3		1..... 2.....	
4		1..... 2.....	
5		1..... 2.....	
6	Kabupaten	1..... 2.....	

Sumber data : DINAS PP & PA

10.3. Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak

TABEL 10.3.1.
JUMLAH KELEMBAGAAN TUMBUH KEMBANG DAN KELANGSUNGAN HIDUP ANAK
TAHUN.....

No	Kecamatan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1						
2						
3						
4						
5						
	Kabupaten					

Sumbe data : Dinas PMDPPA Dan KB, Dinas kesehatan, Dinsos.

10.4. Kelembagaan Partisipasi Anak

TABEL 10.4.1.
JUMLAH KELEMBAGAAN PARTISIPASI ANAK
TAHUN.....

No	Kecamatan	Organisasi/Forum Anak	Telepon Sahabat Anak 129	Lainnya
1				
2				
3				
4				
5				
	Kabupaten			

Sumber data : Dinas PMDPPA Dan PA, Dinas komunikasi dan Informatika

10.5. Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Bagi Anak

TABEL 10.5.1.
JUMLAH KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG LINGKUNGAN YANG KONDUSIF
BAGI ANAK TAHUN.....

No	KECAMATAN	Gugus Tugas Trafiking	Gugus Tugas KLA	LPA	SATGAS PPA	TIM REAKSI CEPAT	KAMPUNG DONGENG	Lain Lain
1								
2								
3								
4								
5								
	KABUPATEN							

Sumber data : DINAS PMDPPA Dan KB

BUPATI PAKPAK BHARAT

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

